

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG RAMAH LINGKUNGAN

Wini Widia Lestari¹, Ginung Pratidina², Faisal Tri Ramdani³

¹Universitas Djuanda, winywl30@gmail.com

ABSTRAK

Kampung Ramah Lingkungan merupakan salah satu program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, program ini ditujukan untuk menangani limbah rumah tangga, limbah kaca, limbah metal, limbah kertas, dan limbah plastik. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program kampung ramah lingkungan (KRL). Metode penelitian berdasarkan Analisa kualitatif deskriptif dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Hasil Analisa data menunjukkan dalam implementasi kebijakan program KRL diketahui komunikasi dalam pelaksanaan sudah banyak yang mengetahui tetapi belum optimal dalam pelaksanaannya, sumber daya berupa SDM masih banyak Masyarakat yang acuh tak acuh dan tidak peduli pada program KRL karena memiliki kesibukan pribadi. Disposisi dalam KRL belum adanya insentif dari pemerintah desa, dan struktur birokrasi dalam program KRL belum terbentuk dengan maksimal dalam penanganan yang efektif terhadap permasalahan lingkungan. Dengan demikian, program KRL belum berdampak secara signifikan dalam penanggulangan sampah di lingkungan Desa Cicadas.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kampung Ramah Lingkungan, limbah rumah tangga.

PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Sumber data penduduk yang digunakan adalah Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2023 adalah sebanyak 278,8 juta jiwa, jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 275,7 juta jiwa menurut Badan Pusat Statistik Nasional. Ini menunjukkan bahwa laju percepatan penduduk di Indonesiasangat signifikan dari tahun ketahun. Begitu pula dengan percepatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor jumlah penduduk Kabupaten Bogor hingga akhir 2022 yaitu 5,4 juta jiwa dan menempati salah satu sebagai berpenduduk terbanyak se-Indonesia menurut Open Data Jabar.

Persoalan pencemaran lingkungan tidak henti-hentinya menjadi pembahasan karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Masalah yang kompleks di mana pencemaran lingkungan lebih banyak bergantung pada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun, baik dalam kualitas maupun dalam menunjang kehidupan. (Hasibuan, 2016)

Menurut Keputusan Dirjen Cipta Karya, nomor 07/KPTS/CK/1999: Juknis Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Ke-PLP-an Perkotaan dan Perdesaan, sampah adalah limbah yang bersifat pada terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi sebuah pembangunan suatu wilayah.

Ada beberapa macam jenis sampah yang bisa diklasifikasikan, yaitu: limbah rumah tangga, limbah kaca, limbah metal, limbah kertas, dan limbah plastik. (Idrus, 2022;Wahyudin, et all.,2023).

Kepedulian masyarakat khususnya rumah tangga dalam pengelolaan limbah rumah tangga sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini. Kurangnya partisipasi lingkungan dalam pengelolaan ini merupakan kendala terpenting dan akan selalu penting melihat data lapangan yang mengkhawatirkan pada sampah rumah tangga.

Hasil observasi sementara menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan program kampung ramah lingkungan (KRL) di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri, meliputi kurangnya sosialisasi pemerintah desa cicadas kepada masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL). Kurang jelasnya pemberitahuan kegiatan dan tidak meratanya informasi pada masyarakat, kiurangnya SDM yang ikut andil dalam pelaksanaan program, masih minimnya anggota KRL, fasilitas yang belum memadai,

sikap para pembuat program belum secara konsisten melakukan terjun langsung ke lapangan dan melemahnya dalam struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk melakukan Analisa secara deskriptif terhadap program KRL di Desa Cicadas Kecamatan Gunung putri. Informan yang dipilih menggunakan Teknik purposive sampling untuk memberikan informasi yang relevan (Lenaini, 2021) dalam program KRL sehingga informan yang dipilih terdiri dari 5 informan yang relevan dengan focus penelitian. Teknik pengumpulan data berdasarkan data sekunder dan primer. Kemudian Teknik Analisa data berdasarkan pada Teknik analisis data deskriptif kualitatif. (Solikhah, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) CAMAR di Desa Cicadas Kecamatan Gunung putri saat ini sedang tidak aktif dalam kegiatan hal apapun dan kurangnya peran serta pengawasan dari pemerintah desa. Maka dari itu, dengan beberapa aspek yang dihadapi dalam mengimplementasikan program agar bisa diaktifkan kembali dan menjadi wadah dan menyajikan program yang berkualitas untuk lingkungan maupun sumber daya masyarakat sekitar.

Hasil penelitian Implementasi Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri dalam mengatasi permasalahan – permasalahan yang di hadapi, maka dari itu dibutuhkan sebuah penerapan dan strategi seperti apa, salah satunya yaitu merujuk pada teori George Edward III dengan mengacu pada indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi disposisi, struktur birokrasi, komunikasi dan sumber daya, sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadi distorsi informasi yang disampaikan atas ke bawah, perlu adanya ketetapan waktu dalam menyampaikan informasi, harus jelas informasi yang disampaikan serta memerlukan ketelitian dan konsisten dalam menyampaikan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diterapkan oleh Kampung Ramah Lingkungan CAMAR di Desa Cicadas mengacu pada tiga aspek yakni :

a. Transmisi

Pada hasil penelitian dengan aspek transmisi ini adalah alur penyampaian informasi kebijakan yang telah ditetapkan apakah sesuai atau tidak. Pertama, dengan mengacu pada ketetapan intruksi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2015 tentang pembentukan Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di Kabupaten Bogor dan di salurkan ke wilayah – wilayah yang tersebar di Kabupaten Bogor sehingga penetapan adanya program KRL tersebut di setiap wilayah melalui Kepala Desa. Dengan dibentuk dan diadakannya program KRL ini seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bogor memerintahkan kepada setiap RW di masing – masing desa untuk melakukan program tersebut.

Kedua, salah satu yang menerapkan kebijakan program tersebut adalah Desa Cicadas yang berdiri tahun 2020 pada saat pandemi covid-19. Salah satu solusi untuk warga dengan adanya program KRL ini saat pandemi covid dengan tidak ada kegiatan apapun karena keterbatasan gerak dan ruang, jadi program kerja KRL juga disesuaikan dan dilihat dari sumber daya alamnya.

Ketiga, penyampaian informasi dari pihak pemerintah desa melalui tangan kanannya yaitu seluruh ketua RW di kumpulkan untuk mensosialisasikan kebijakan program KRL ini, tetapi masih bersifat tidak wajib dan mempersilahkan untuk dibentuk program tersebut atau tidak. Informasi yang sudah di dapatkan akan disebarluaskan melalui aplikasi whatsApp atau dari mulut kemulut, sehingga penyebaran informasi lebih efisien.

b. Kejelasan

Pada hasil penelitian dengan aspek kejelasan yaitu menjelaskan tentang tujuan yang telah ditetapkan jelas adanya dan sesuai dengan kebijakan yang di buat.

Desa Cicadas sendiri sudah melaksanakan pembentukkan program KRL itu sendiri dan dari tahun 2020 – sekarang, sudah memiliki 3 (tiga) KRL di wilayah Desa Cicadas, yaitu KRL CAMAR RW 02, KRL HARAPAN di RW 01, dan KRL CIBER di RW 06. Walaupun belum merata dan desa kita tertinggal jauh dari pada desa lain di kecamatan gunungputri tapi kami berusaha untuk terus melanjutkan pengadaan program KRL dari pemerintah pusat tersebut.

Di beberapa pembentukkan KRL ataupun bank sampah, sosialisasi yang paling mudah memang di perumahan karna mereka bisa dikoordinasikan satu arah oleh RT/RW setempat, penyempaian informasipun lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat perkampungan yang notabennya tempat tinggal yang lumayan jauh- jauh dan berjarak sehingga untuk penyampaian informasi tidak bisa semua.

Salah satu KRL yang di teliti oleh peneliti adalah KRL CAMAR di RW 02, yang saat ini mengalami pemberhentian dalam kegiatan dan operasional

lainnya. Beberapa permasalahan internal bisa terjadi, diantaranya adalah kesalahan komunikasi yang tidak baik antara pemerintah desa, anggota KRL maupun warga masyarakat itu sendiri. Sehingga menyebabkan pemberhentian sementara sampai waktu yang tidak dapat di tentukan apakah akan berjalan kembali atau tidak.

b. Konsistensi

Pada hasil penelitian dengan aspek konsistensi ini, yaitu harus adanya ketetapan tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Sayangnya pada aspek konsistensi ini, masih belum terlaksana dengan sempurna. Karena pada pelaksanaannya, Desa Cicadas dari awal terbentuk 2020 sampai saat ini hanya memiliki 3 KRL dan hanya 1 KRL yang masih bertahan dengan melaksanakan program – programnya, salah satu yang tidak berhasil adalah KRL CAMAR. KRL CAMAR sedang berhenti dari kegiatan apapun yang berhubungan dengan program – program lingkungan dan lain - lain. Faktornya adalah tidak ada tindakan tegas dari pihak pemerintah desa, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program KRL tersebut.(Prasetya, 2020)

Pemerintah desa juga tidak ada tanggapan lebih lanjut, karena menganggap program ini dilakukan atas dasar kesadaran masyarakat saja bukan berangkat dari sebuah kebijakan yang diberlakukan dari pemerintah pusat kabupaten bogor.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal terpenting dalam implementasi kebijakan yang baik. Pendekatan sumber daya merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi, sumber daya utama dalam kebijakan adalah aparatur/ pegawai atau sumber daya manusia itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang diterapkan oleh Kampung Ramah Lingkungan CAMAR di Desa Cicadas mengacu pada empat aspek yakni:

a. Staff

Pada hasil penelitian dengan aspek staff ini mengemukakan pada sekelompok orang dalam suatu organisasi yang turut membantu ketua atau pimpinan di atasnya.

Pertama, awal terbentuknya KRL CAMAR sudah terbentuk beberapa bagian kepenugasan untuk ketua sampai dengan anggota, tetapi karna faktor individu anggota tersebut yang kerap beralasan dan tidak menginginkan kemajuan pada program KRL sehingga menyebabkan kurangnya tingkat partisipasi yang diberikan untuk melaksanakan program.

Kedua, di masyarakat ada konflik sesama pengurus atau anggota, hal-hal biasalah yang seperti itu sering terjadi. Kalaupun melihat fakta lapangan hanya 5-10 anggota saja yang masih atau ingin melakukan program ini, dan itupun tergantung situasi jika 5-10 orang itu tidak aktif maka tidak akan jalan program tersebut, maka dari itu kenapa KRL CAMAR sekarang tidak berjalan kembali. Banyaknya yang sibuk dengan pekerjaan, ibu-ibu pengurus yang tidak punya waktu luang karna mengurus hal-hal rumah tangga atau pekerjaan sampai berdangang, ataupun anak muda yang sulit karena tidak ada waktu banyak setelah kegiatan di luar, pak RT dan RW yang sibuk di perusahaan tempat mereka bekerja. Jadi jika hanya mengandalkan 1-2 orang saja kegiatan tersebut tidak akan berjalan karena program KRL atau bank sampah memerlukan sumber daya manusia yang banyak untuk beberapa penerapan program – programnya.

b. Informasi

Pada hasil penelitian dengan aspek Informasi ini adalah sebuah data yang diperlukan aparatur guna ditunjukkan kepada penerima dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

Di zaman yang serba mudah dengan adanya komunikasi dan sosial media yang jangkauannya luas. Penyebaran informasi mengenai program KRL CAMAR ini dan segala aktivitas yang dilakukan bisa dilihat di sosial media instagram dengan nama akun *@krl_camar_02*.



Gambar Instagram KRL CAMAR

Sayangnya, di akun instagram tersebut aktif terakhir pada tanggal 23 November 2021 dan tidak update kembali setelahnya. Untuk selebihnya biasanya ketua KRL CAMAR hanya memberikan informasi melalui aplikasi whatsapp saja dengan isi pesan broadcast melalui grup atau membuat status dan sekarang sudah benar-benar tidak berjalan kembali sampai waktu yang tidak dapat ditentukan.

Kemudian penyampaian informasi kepada masyarakat ini bisa di bilang terbagi menjadi dua bagian, yaitu masyarakat yang tinggal perkampungan dan masyarakat yang tinggal di perumahan. Perbedaan signifikan yang terjadi pada saat memberikan sosialisasi perihal program KRL ini.

Masyarakat yang tinggal di perumahan lebih terbuka wawasannyadan lebih memahami program KRL tersebut, sampai saat ini juga yang masih berjalan KRL nya adalah KRL yang bermukim di perumahan. Karena mereka tidak apatis dan mau mencoba hal baru. Beda lagi dengan masyarakat perkampungan yang notabennya lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka beranggapan bahwa lebih baik bekerja dibandingkan ikut program pemerintah yang tidak ada feedbacknya ke mereka atau tidak ada insentif berkelanjutan.

c. Kewenangan

Pada hasil penelitian dengan aspek kewenangan adalah suatu hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dalam menjalankan kebijakan program agar mencapai tujuan tertentu.

Program yang dibawah naungan LPM Desa Cicadas ini sangat tertarik mengajak dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat perihal pembentukan KRL ini. Tetapi balik lagi kepada kesadaran masyarakatnya itu sendiri, apakah ada keinginan menjalankan dari program pemerintah ini, karena biasanya kami pihak desa ada keterhambatan dari sumber daya manusianya yaitu masyarakat yang tinggal diwilayah yang akan dibuat program KRL tersebut. Sehingga pembentukkan tidak akan terjadi jika masyarakat ataupun lingkungan tidak memadai.

Jika memang sudah berhasil dengan persentase 50% dari beberapa RW di Desa Cicadas menerapkan pembentukkan KRL barulah pemerintah desa akan membuat kebijakan dan mewajibkan setaip RW diadakan KRL secara menyeluruh. Salah satu faktornya juga karna tidak adanya alokasi dana yang mengalir pada program KRL ini sehingga alokasi dana yang seharusnya untuk KRL menjadi dialihkan pada pembangunan infrastruktur wilayah setempat.

KRL Camar termasuk yang belum berjalan lagi dikarenakan dari Desa Cicadas sendiri KRL belum diwajibkan jadi pemerintah desa inginnya tercipta secara mandiri atas kesadaran masyarakatnya bukan karna kebijakan pemerintahnya.

d. Sarana dan Prasarana

Pada hasil penelitian pada aspek ini adalah sarana yaitu lebih ditunjukkan untuk alat atau benda-benda yang digunakan dalam pelaksanaan program KRL CAMAR. Sedangkan prasarana lebih ditunjukkan untuk fasilitas yang tidak bergerak. Untuk program KRL sendiri LPM membantu untuk pendanaan masuk oleh CSR (*Coorporate Social Responsibility*) atau bisanya perusahaan-perusahaan yang terdapat di wilayah sekitar KRL yang akan diajukan proposal bantuan dana, yang nantinya diberikan berupasarana dan prasarana dalam menunjang program tersebut. Desa tidak mengganggarkan untuk program KRL.

Sarana prasarana yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan kebutuhan yang KRL inginkan, misalkan KRL tersebut pernah mengajukan proposal bantuan melalui *Corporate Social Responsibiliy* (CSR) di wilayah cicadas berupa alat timbangan, tempat sampah, dropbox bahan-bahan budi daya tanaman sayuran, budi daya maggot dan lainnya. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan walupun tanpa mengeluarkan dana sepeserpun untuk modal awal

kegiatan program ini dengan adanya bantuan dari CSR tersebut.

Sarana dan prasarana selebihnya seperti contoh alat kebersihan biasanya perindividu masing – masing warga membawa sendiri dari rumah masing – masing. Karena pelaksanaan program KRL salahsatunya ada tentang bersih – bersih lingkungan yang dimana seluruh masyarakat di lingkungan KRL secara gotong royong membantu membersihkan lingkungan sekitar sebelum melakukan penimbangan pada program bank sampah.

3. Disposisi

Disposisi merupakan suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan pada pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan secara sungguh-sungguh, proses ini memiliki konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Keberadaan aparat pelaksana memiliki peranan yang besar dan menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya.

a. Efek Disposisi

Hasil penelitian pada aspek ini adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh pelaksana suatu kebijakan suatu asset yang menguntungkan atau merugikan pada program yang dijalankan.

Warga pada awalnya sangat antusias banget dengan adanya program KRL ini diwilayah mereka sampah bisa tembus 400 nasabah bank sampah untuk penjualan limbah dari warga dan melakukan kerja bakti setiap minggu. Awal-awal adanya kegiatan ini positif sekali untuk lingkungan, ditambah kita mendapatkan sponsor dari perusahaan besar untuk mendorong program KRL dan Bank sampah sampai berkembang.

Tetapi program KRL CAMAR sampai saat ini sudah tidak aktif dari awal pembentukan pun tidak merasakan diberikan oleh bantuan dana desa. Uang yang dihasilkan juga hasil penjualan limbah masyarakat akan diputar kembali supaya bisa bertahan. Walaupun sekarang KRL Camar belum berjalan lagi karna banyaknya faktorkendala salah satunya keuangan.

b. Insentif

Hasil penelitian ini adalah berupa upah lebih yang diberikan kepada pelaksana kebijakan program. (Ramdani, 2022)

Jika anggota staff atau nasabah umum yaitu masyarakat itu mereka secara swadaya melakukan program ini tidak berharap imbalan apapun dan tidak mendapatkan insentif sedikitpun bahkan dari desapun tidak ada. CSR juga memberikan bantuan barang/ fasilitas yang nantinya digunakan atau berupa program yang diberikan untuk dilaksanakan pada KRL tersebut. Karna desa tidak memberikan alokasi dananya kepada program KRL dari mulai terbentuk sampai saat ini.

Semua masyarakat dari program ini tidak diberikan gaji sepeserpun. Tetapi ada program yang dilaksanakan yaitu budi daya tanaman sayuran yang sudah berhasil panen sayur kangkung dan hasil tersebut bisa dirasakan pula oleh masyarakat. Kemudian ada bank sampah, salah satu program ini yang berlandaskan perputaran ekonomi di dalamnya.

Dengan adanya penjualan limbah/ sampah menjadikan barang yang tidak berguna bersifat ekonomis dengan cara limbah/ sampah dijual kepada bank sampah kemudian menggunakan sistem barter putus yaitu jual sampah ke bank sampah kemudian nasabah tersebut langsung mendapatkan hasilnya berupa uang atau sembako. Sedangkan satu lagi yaitu sistem tabung, nasabah diberikan buku tabungan dan pada saat penimbangan sampah hasilnya dicatat

dibuku tabungannya tersebut dan akan diberikan setiap satu tahun sekali sebelum bulan puasa.

Sedangkan anggota ataupun pengurus tidak diberikan gaji tapi hasil keuntungan penjualan sampah yang dijual kepada pengepul bisa digunakan untuk kebutuhan air minum pada saat kegiatan. Jika melihat dari nilai gaji atau ekonomi, mungkin tidak ada ini keikhlasan kami untuk melakukan kegiatan program KRL dan bank sampah berlangsung. Tetapi masyarakat yang menjual limbah/ sampahnya akan mendapatkan penghasilan yang dijual setiap minggunya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Di dalamnya terdapat aspek seperti mekanisme atau standar prosedur pelaksana (SOP) dan struktur organisasi atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan implemenkebijakantasi. (Wahyudin, 2022; Ramdani, et all,2023).

a. Fragmentasi

Hasil penelitian ini berupa aspek fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab beberapa unit aparaturn pelaksana di suatu lokasi. Di desa Cicadas sendiri hanya lembaga non pemerintahan seperti LPM ini yang ikut andil dalam melakukan kebijakan program KRL di masyarakat. LPM membantu menjembatani KRL dengan CSR perusahaan untuk mendapatkan hibah dana bantuan. Tetapi dari aparaturn desa cicadas tidak ada yang peduli bahkan sampai tidak diberikan dukungan terhadap KRL dikarenakan mereka menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak wajib dilaksanakan tetapi boleh dilaksanakan oleh wilayah RW masing-masing. Aparaturn desa mendukung dengan adanya KRL tetapi tidak ikut andil dalam pelaksanaan program KRL.

b. Standar Prosedur Pelaksana (SOP)

Hasil penelitian ini berupa aspek standar operasional pelaksana yang merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non pemerintah yang bertujuan memastikan pekerjaan berjalan dengan lancar.

Karena KRL CAMAR ini hanya di bawah naungan LSM desa Cicadas bukan aparatur desa inti, maka dari itu program yang di jalankan di laksanakan dengan keputusan ketua LSM desa Cicadas. Untuk pendanaan pun hanya mengandalkan pengajuan proposal melalui CSR dan jika di terima barulah program akan berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Karena belum ada lagi dukungan dari pihak desa cicadas untuk melanjutkan KRL CAMAR di wilayah RW 002 ini, mungkin banyak yang menganggap bahwa tidak bisa berjalan karena banyaknya kekurangan dari kegiatan program yang kemarin telah berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di Desa Cicadas Kecamatan Gunungputri belum optimal dalam pelaksanaan program. Kemudian peran pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan program tersebut, dikarenakan kebijakan yang diberikan tidak bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Adapun untuk optimalisasi program KRL ini maka perlu adanya pelibatan yang signifikan antara pemerintah desa dengan Masyarakat setempat. Sehingga, dapat meningkatkan optimalisasi program KRL yang saling bersinergi. Dengan demikian peran pemerintah ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan optimalisasi program KRL di Desa Cicadas Kecamatan Gunungputri.

Sehingga dapat mewujudkan tujuan dari program KRL tersebut yang akan berdampak pada peningkatan kesadaran Masyarakat akan keramahan lingkungan.

REFERENSI

- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.
- Ibrahim, L., Seran, G. G., & Pratidina, G. (2019). Implementasi Program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 5(1), 89.
- Idrus, I. A. (2022). The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA). *Journal.Uta45Jakarta*, 8(2), 72-84.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Prasetyani, E. (2020). Peranan Masyarakat Mengangkat Perekonomian Kampung Kumuh Berbasis Kampung Ramah Lingkungan Sebagai Bagian Untuk Dijadikan Sebagai Desa Wisata. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata*, 1(2), 89-95.
- Ramdani, F. T., Apriliani, A., Ilyanawati, R. Y. A., Apriliyani, N. V., Ramadanti, N. P., & Pratami, M. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda. *Jurnal Governansi*, 9(1), 1-6.
- Sholikhah, A. (2016). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342-362.

Wahyudin, C., Subagdja, O., & Iskandar, A. (2023). Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. *Jurnal Governansi*, 9(2), 151-162.

Wahyudin, C. (2022). Implementation Of Online Annual Motor Vehicle Tax Payment Services In The Cibadak Samsat Area, Sukabumi Regency. *Journal of Multidisciplinary Science*, 1(2), 64-70.

Yusuf, A. P., Ramadanti, N. P., Subandi, N. I., & Ramdani, F. T. (2022). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 1(3), 289-297.